

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/350993803>

India-Indonesia dan Masa Depan Samudera Hindia

Article · September 2020

CITATIONS

0

READS

2,511

1 author:



[Hadza Min Fadhli Robby](#)
Universitas Islam Indonesia

30 PUBLICATIONS 7 CITATIONS

SEE PROFILE

INDIA-INDONESIA DAN MASA DEPAN SAMUDERA HINDIA

Oleh: Hadza Min Fadhli Robby
Universitas Islam Indonesia
E-mail: hadza.fadhli@uii.ac.id

ABSTRACT

This paper discusses India and Indonesia's position on the issue of Indian Ocean. Indian Ocean has been the shared destiny for both India and Indonesia. Since the earliest episode of their histories, India and Indonesia had built intense interaction through educational and cultural linkage. Although disrupted by the colonialism and imperialism, the interaction and cooperation between India-Indonesia did not stop. At first, Indonesia initiated a new form of cooperation amongst countries within Indian Ocean which is remembered as Asian-African Conference. But, as the maritime and naval consciousness of both India and Indonesia rises, both countries tried to develop a new outlook on Indian Ocean as a shared future. This paper will discuss the relations of India-Indonesia in the context of Indian Ocean and the perspectives of both countries on Indian Ocean governance.

Keywords: *Indian Ocean, India, Indonesia, oceanic governance*

ABSTRAK

Makalah ini membahas posisi India dan Indonesia dalam isu Samudera Hindia. Samudera Hindia telah menjadi takdir bersama bagi India dan Indonesia. Sejak episode awal sejarah kedua negara, India dan Indonesia telah membangun interaksi yang intens melalui Samudera Hindia di ranah pendidikan dan kebudayaan. Meskipun sempat terganggu dengan adanya

kolonialisme dan imperialisme, interaksi dan kerjasama antara India dan Indonesia tidak berhenti. Pada awalnya, Indonesia membangun satu bentuk kerjasama baru antara negara-negara yang berada di kawasan Samudera Hindia, yang kemudian dinamai dengan Konferensi Asia Selatan. Namun, seiring dengan tumbuhnya kesadaran maritim dan kelautan di India dan Indonesia, kedua negara mencoba untuk mengembangkan satu cara pandang baru terhadap Samudera Hindia sebagai masa depan bersama. Makalah ini akan mendiskusikan hubungan India-Indonesia dalam konteks Samudera Hindia dan perspektif kedua negara dalam tata kelola Samudera Hindia.

Kata Kunci : Samudera Hindia, India, Indonesia, Tatakelola Samudera

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun belakangan, India sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah maritim di Samudera Hindia mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu kekuatan maritim di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini didorong oleh adanya keinginan India untuk menentang upaya beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, untuk mengklaim hegemoni di Samudera Hindia. India hendak bangkit sebagai sebuah kekuatan maritim yang dapat berperan dalam stabilisasi keamanan di wilayah Samudera Hindia serta menjadi pengatur dan penegak norma dalam pengelolaan kawasan Samudera Hindia. Sebagai upayanya untuk memantapkan pengaruh di Samudera Hindia, India telah mempersiapkan beberapa skenario kebijakan. Salah satu skenario kebijakan yang paling penting dan sedang diupayakan oleh India adalah upaya membangun aliansi dengan beberapa negara dalam isu Samudera Hindia. Upaya untuk membangun aliansi ini, misalnya, diupayakan dengan pembentukan sebuah organisasi kawasan yang memiliki tujuan untuk membangun kerangka hukum dan norma internasional dalam isu kelautan yang lebih kuat. Hal ini dapat dilihat dari inisiatif India dalam membentuk organisasi IOR-ARC (yang saat ini dikenal sebagai IORA).

Selain itu, dalam kerangka bilateral, India juga membangun hubungan dengan beragam negara yang dianggap dapat menjadi mitra dalam kerjasama di kawasan Samudera Hindia. Dalam banyak bahasan akademik, peran Jepang dan Australia seringkali dibahas sebagai mitra India dalam membangun rezim kerjasama di Samudera Hindia. Di samping Australia dan Jepang, Indonesia juga menjadi salah satu mitra dekat India. Dalam perjalanan sejarah, hubungan India dan Indonesia dapat dilihat sebagai hubungan yang cenderung kaku dan tidak dinamis. Meskipun jejaring perdagangan dan budaya antar kedua negara terus berlangsung selama berabad-abad melalui jalur maritim Samudera Hindia, namun kedua negara tidak membangun hubungan yang erat.

Kesadaran tentang perlunya mengembangkan hubungan yang lebih dekat baru mulai terbangun setelah awal dekade 2000-an, dimana India dan Indonesia menyadari bahwa ada banyak konvergensi kepentingan. Tidak hanya dalam isu politik internasional, India dan Indonesia juga memiliki ragam kepentingan yang serupa dalam sektor yang berbeda-beda, mulai dari isu ekonomi, maritim hingga pertahanan. Sejak era pemerintahan PM Manmohan Singh dari Partai *Indian National Congress* (INC), kedua negara bertemu secara lebih intensif dalam beragam kesempatan. Sejak tahun 2014, ketika Narendra Modi menjadi Perdana Menteri India dan *Bharatiya Janata Party* (BJP) menjadi partai pemerintah, hubungan India-Indonesia dikuatkan dengan adanya rencana penandatanganan *Comprehensive Strategic Partnership* (Singh 2018). Dalam konteks penguatan hubungan ini, India-Indonesia memberikan penekanan besar pada pentingnya kerjasama maritim dan kelautan.

Tulisan ini hendak mengelaborasi perjalanan sejarah, dinamika serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hubungan antara India dan Indonesia, terutama dalam konteks Samudera Hindia. Dalam elaborasi awal, tulisan ini akan mencoba untuk membahas Samudera Hindia dari perspektif India dan Indonesia. Setelahnya, tulisan ini akan melihat kebangkitan India (*Rise of India*) yang kemungkinan akan berakhir pada *Pax Indica*. Konsep *Pax Indica*, terutama dalam aspek politik kawasan Asia-Pasifik dan politik maritim di Samudera Hindia, telah dibahas oleh beberapa pakar dan mulai dibincangkan secara intens oleh para politisi India. Tulisan ini akan melihat bagaimana *Rise of India* dan wacana *Pax*

Indica dalam konteks politik kawasan dan politik maritim perlu dilihat oleh Indonesia.

Pembahasan tersebut akan disertai dengan penggunaan teori realisme defensif, yang menyatakan bahwa upaya suatu negara untuk memperkuat hegemoni tidak akan berujung pada kestabilan dan keamanan yang pada akhirnya akan mengancam kepentingan nasional. Menurut Kenneth Waltz, struktur internasional hanya memungkinkan suatu negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya secara terbatas. Pada akhirnya, tulisan akan diakhiri dengan kilasan tentang kemungkinan kebijakan yang dapat diambil Indonesia dalam pengelolaan Samudera Hindia.

B. PEMBAHASAN

Pembahasan akan dimulai dengan menjawab pertanyaan, “Bagaimana India dan Indonesia memandang Samudera Hindia?”. Meskipun India dan Indonesia memiliki perjalanan sejarah dan dinamika politik yang berbeda, namun kepentingan India dan Indonesia memiliki kemiripan dalam isu Samudera Hindia. Kemiripan ini dibangun atas dasar latar belakang sejarah dan kerjasama politik yang terus berjalan sejak lama.

Jika kita melihat kembali latar belakang sejarah Samudera Hindia, kita dapat melihat bahwa Samudera Hindia penghubung antara kedua negara bahkan sejak sebelum kedua negara merdeka. Samudera Hindia menyaksikan adanya pertukaran intelektual, budaya dan komoditas dagang antara komunitas Bharat (istilah Sanskerta untuk India) dan Nusantara selama lebih dari satu milenium. Dari Samudera Hindia, baik Bharat maupun Nusantara mendapatkan komoditas yang diperlukan untuk mengembangkan peradaban dan budaya di masing-masing negara. Relief kapal dagang di Candi Borobudur, adanya pertukaran intelektual antara institusi pendidikan di Nalanda dan Sriwijaya, dan menyebarnya agama Hindu-Buddha di Nusantara merupakan bukti dari interaksi yang pernah terjadi di kawasan Samudera Hindia (Sanyal 2016). Ketika terjadi kolonialisme di kedua negara, Samudera Hindia tidak serta-merta memutuskan hubungan Bharat dan Nusantara. Samudera Hindia tetap menjadi pengikat antara kedua bangsa yang berbeda, dimana ragam

komunitas dari Bharat melakukan migrasi menuju Nusantara untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik. Samudera Hindia menjadi saksi bagaimana kedua bangsa membangun solidaritas antar sesama pada era imperialisme yang pada saat itu mendominasi kawasan Asia.

Setelah Bharat dan Nusantara menjadi negara-bangsa, Samudera Hindia menjadi sesuatu yang dilupakan begitu saja oleh negara India dan Indonesia yang baru saja merdeka. Karena adanya sejarah panjang dominasi imperial Inggris dan Belanda dalam pengelolaan Samudera Hindia, India dan Indonesia seolah menjadi pewaris yang tidak diberikan pengetahuan tentang cara mengelola warisan yang begitu besar potensinya. Yang terjadi pada masa-masa awal setelah kemerdekaan adalah kedua negara begitu sibuk dengan proses bina-negara dan bina-bangsa. Sebagai konsekuensi, orientasi visi geopolitik yang dimiliki oleh India dan Indonesia lebih banyak berfokus ke kedaulatan yang bersifat teritorial (darat) dan kontinental, serta mempertahankan kawasan dari ancaman-ancaman separatisme yang mulai muncul di waktu itu. Dalam perspektif India, sebenarnya kesadaran tentang pentingnya Samudera Hindia telah muncul sejak pertengahan abad ke-20. Seorang sejarawan ternama India bernama Kavalam Panikkar menyatakan bahwa India sudah seharusnya sadar akan potensi besar Samudera Hindia yang dapat memberikan keuntungan dari segi politik dan keamanan (Paul 2011). Pemikiran Panikkar yang berdasar pada paradigma Mahanian ini sayangnya tidak menjadi dasar pemikiran strategis bagi pemerintahan India yang baru saja merdeka (Scott, India's "Grand Strategy" for the Indian Ocean: Mahanian Visions 2006). Pada masa itu, orientasi pemikiran strategis India lebih banyak difokuskan untuk memperkuat pertahanan darat karena adanya ancaman dari Pakistan dan Tiongkok.

Dalam sudut pandang yang lain, Indonesia sebenarnya sudah menumbuhkan kesadaran tentang potensi maritim. Hal ini terkait erat dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga Indonesia sejak awal mencoba untuk mengembangkan pemikiran berorientasi maritim dan kelautan. Meskipun bentuk pemikiran yang dikembangkan ini lebih banyak yang sifatnya primitif dibandingkan kebijakan yang kongkret dan komprehensif, namun jejak-jejak pemikiran awal ini menemukan relevansi kembali di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Salah satu

pemikiran penting yang berkembang pada masa pra-kemerdekaan Indonesia adalah pemikiran geopolitik Sam Ratulangi. Pemikiran geopolitik yang dikembangkan oleh Sam Ratulangi melihat bahwa kawasan Asia-Pasifik dan Samudera Pasifik dapat menjadi kunci bagi *positioning* Indonesia dalam sektor geopolitik dan geoekonomi (Noviansyah 2018). Namun, pemikiran Ratulanganian tidak begitu memberikan fokus pada eksistensi Samudra Hindia. Hal ini dapat dimaklumi karena Samudera Hindia pada masa itu merupakan sebuah wilayah yang dikunci oleh Imperium Britania, sehingga Ratulangi tidak memberikan penekanan khusus terhadap Samudera Hindia. Setelahnya, Samudera Hindia-Samudera Pasifik hanya dianggap sebagai sebuah kenyataan fisik yang tidak dieksplorasi secara ideasional.

Seiring dengan pengembangan pengaruh Indonesia di tataran politik kawasan, Indonesia mencoba untuk memperluas pengaruh ke tataran yang lebih luas. Gagasan geopolitik Indonesia yang berdasar pada aktivisme politik dan netralitas blok mengarahkan Indonesia untuk bergerak di luar batas geografis tradisional Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Imajinasi geopolitik Indonesia yang dibangun oleh Mohammad Hatta dalam kerangka politik luar negeri bebas-aktif tidak hanya beroperasi di Asia, namun juga kawasan-kawasan seperti Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur dan Amerika Latin. Meskipun tidak memiliki agenda operasional terkait Samudera Hindia, namun Indonesia hendak menguatkan kerjasama antar negara-negara yang berada di dalam lingkup batas pesisir Samudera Hindia. Dengan mendorong inisiatif seperti Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok, secara tidak langsung Indonesia sebenarnya ingin mengkonsepsikan Samudera Hindia sebagai sebuah zona perdamaian dan netralitas blok. Sebagai penghubung dua benua utama dunia, yakni Asia dan Afrika, terjaganya stabilitas dan netralitas di kawasan Samudera Hindia akan berpengaruh besar terhadap keamanan internasional.

Di waktu yang sama, India dibawah kepemimpinan Nehru juga melaksanakan politik luar negeri berdasar pada gagasan yang relatif serupa dengan Indonesia. Bagi Nehru, penting bagi negara dengan tantangan yang beragam seperti India untuk membangun gagasan geopolitik yang bersifat pragmatis dan idealis di saat bersamaan. Nehru berpendapat bahwa netralitas dan ketidakikutsertaan India dalam blok politik (*nonalignment*)

di Perang Dingin merupakan gagasan geopolitik yang tepat untuk dijalankan pada masa tersebut (Power 1964). Dengan dua prinsip tersebut, India dapat secara lihai menempatkan dirinya dalam politik kawasan dan internasional, tanpa perlu mengorbankan kepentingan nasional dalam tataran yang ekstrem. Selain itu, pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan ide-ide Gandhian yang menjauhkan India untuk menjadi kekuatan yang terlampau agresif, baik di politik kawasan dan politik internasional. Pemahaman geopolitik ala Gandhian-Nehruvian ini membuat India untuk membatasi tujuan-tujuan politik luar negeri pada hal-hal yang penting bagi kepentingan nasional India. Hal inilah yang menyebabkan India pada tahun-tahun 1950-1960an tidak memiliki program mercusuar dalam sektor pertahanan dan keamanan, kecuali pembelian alutsista yang sifatnya digunakan sebagai *deterrence* untuk menghadapi ancaman *immediate enemy* di kawasan Asia Selatan (Thomas 1980). Faktor ini pulalah yang mendorong AL India bekerja secara amat terbatas di kawasan lautan sekitar Asia Selatan dan Samudera Hindia.

Berbeda dengan India, Indonesia terlihat mencoba untuk lebih menguatkan postur keamanannya di wilayah Samudera Hindia. Sadar akan adanya ancaman nekolim di kawasan Asia Tenggara dan pentingnya proses integrasi Papua ke Republik Indonesia, Soekarno menguatkan postur pertahanan udara dan laut Indonesia. Dengan melakukan serangkaian perjanjian dengan pihak Uni Soviet, Indonesia membeli ragam alutsista yang terdiri dari kapal penjelajah, kapal penghancur, kapal selam, kapal patroli dan beberapa jenis pesawat tempur dan pengebom untuk digunakan dalam upaya perebutan Papua dan operasi militer Dwikora di Kalimantan Utara (US Congress House Committee on Foreign Affairs 1971). Di saat yang sama, Indonesia juga menegaskan identitasnya sebagai negara kepulauan dengan Deklarasi Juanda. Namun, upaya membangun supremasi Indonesia ini tidak sepenuhnya berhasil seiring dengan pergantian kekuasaan di Indonesia.

Di saat yang sama, India sedang menghadapi tantangan keamanan yang tak mudah dari ragam tempat. Perdana Menteri India pada masa itu, Indira Gandhi, memiliki pandangan yang cukup berbeda dengan Jawaharlal Nehru yang memiliki pandangan internasionalis. Indira Gandhi berfokus untuk membangun India agar dapat menjadi kekuatan

militer yang disegani di kawasan Asia Selatan (Kapur 1987). Gagasan geopolitik yang berorientasi pasifis dan internasionalis bukan lagi menjadi orientasi Indira Gandhi. Namun, saat Sri Lanka mendorong terbentuknya gagasan Samudera Hindia sebagai '*Zone of Peace*', India kemudian seolah dipaksa untuk mengembangkan kebijakan yang lebih proaktif di Samudera Hindia. Inisiasi IOZOP atau *Indian Ocean as a Zone of Peace* didasari oleh adanya keresahan akan aktivitas militer yang meningkat di wilayah Samudera Hindia (Vivekanandan 1981). Adanya IOZOP mencoba untuk membatasi meningkatnya aktivitas militer yang dapat membatasi pergerakan secara bebas di wilayah Samudera Hindia dengan pengawasan kolektif dari organisasi internasional dan kerjasama regional. Konsekuensi dari IOZOP adalah meningkatnya aktivitas maritim India di wilayah Samudera Hindia. India mulai meningkatkan kapasitas maritimnya secara terbatas dan melakukan ragam kerjasama maritim dengan beberapa negara yang memiliki pesisir di Samudera Hindia. Dengan adanya pengembangan konsep, doktrin dan kebijakan maritim India, India tidak lagi melihat Samudera Hindia sebagai sebuah kawasan ancaman (*geography of threat*) yang memojokkan India, namun sebagai sebuah kawasan yang penuh dengan kesempatan (*geography of opportunity*) (Scott 2015). Hal ini tentu selaras dengan pemikiran Panikkar yang disebut di awal tulisan ini.

Adanya IOZOP juga direspon oleh Indonesia dengan penetapan konsepsi Wawasan Nusantara yang makin memantangkan gagasan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Seiring dengan penguatan konsepsi Wawasan Nusantara, Indonesia berupaya untuk mengembangkan Angkatan Laut dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim. Sama seperti India, konsepsi Wawasan Nusantara yang dikembangkan oleh Indonesia tidak hanya melihat bentang geografi laut Indonesia sebagai sebuah wilayah kedaulatan yang perlu dilihat dalam aspek keamanan, namun juga dalam aspek ekonomi dan perdagangan (Sebastian, Supriyanto & Arsana 2014). Adanya Wawasan Nusantara seharusnya dapat mendorong reformasi dan penguatan kapasitas pertahanan laut Indonesia. Namun, hal tersebut berlangsung tidak maksimal karena Presiden Soeharto pada masa itu lebih memfokuskan pada penguatan aparaturnya untuk menghadapi ancaman domestik. Dengan membeli beberapa alutsista dari beberapa negara rekanan, Indonesia mengembangkan kapasitas keamanan maritim secara terbatas. Demi memastikan keamanan wilayah

Nusantara dan sekitarnya, termasuk Samudera Hindia, sejak tahun 1980-an Indonesia juga telah aktif pula mengadakan Operasi Keamanan Laut atau yang biasanya disebut sebagai Operasi Kamla. Operasi Kamla yang dikoordinasi langsung oleh Koarmabar (sekarang disebut sebagai Koarmada) memastikan supremasi Indonesia di wilayah laut Nusantara (Honua 2008).

Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, orientasi negara terhadap isu-isu kesamuderaan dan kemaritiman mulai bertransformasi. Transformasi ini mulai terlihat dari bagaimana beberapa negara melakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih sinergis dalam pengelolaan samudera. Dalam pandangan Vallega, masa setelah Perang Dingin membawa komunitas negara-negara untuk menghadapi perubahan dinamika politik dan globalisasi dengan membentuk tatakelola kelautan yang lebih bersifat komprehensif (Vallega 2001). Dalam konteks Samudera Hindia, negara-negara yang berada di dalam cakupan Samudera Hindia bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi khusus yang dinamakan sebagai IOR-ARC (*Indian Ocean Rim-Association for Regional Co-operation*). IOR-ARC digerakkan atas inisiatif dari Afrika Selatan dan India sebagai sebuah upaya untuk menegaskan kerjasama antar negara-negara dalam lingkup Samudera Hindia untuk tetap menjaga status IOZOP (Wagner 2013). Saat India sedang membangun sebuah kerangka doktrin maritim yang baru melalui IOR-ARC, India juga mengalami sebuah transformasi dalam politik luar negeri. Tendensi *nonalignment* dan netralitas yang dahulu menjadi suatu prinsip yang sakral dalam politik luar negeri India mulai ditinggalkan, dan India mulai mencoba untuk mengembangkan satu pandangan strategik yang lebih berbeda dari sebelumnya (Chiriyankadath 2004). Sejak era Narasimha Rao dan Atal Bihari Vajpayee, India mulai meluaskan pandangan untuk memandang ke Timur, atau meluaskan kerjasama ekonomi tidak hanya dengan negara-negara maju di Barat, namun juga negara-negara industri berkembang di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara (Acharya 2015). Kebijakan yang disebut sebagai *Look East* ini juga berpengaruh terhadap cara pandang India terhadap Samudera Hindia. India mulai memetakan kemungkinan yang akan terjadi kedepan, terutama melihat kemungkinan bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan maritim yang dapat memperluas area pengaruh militer dan komersial di Samudera Hindia.

Ada beberapa faktor yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan dalam strategi kontemporer India di Samudera Hindia. Faktor pertama adalah faktor kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan maritim. Kebangkitan Tiongkok memberikan kekhawatiran tersendiri kepada India yang hendak memanfaatkan potensi Samudera Hindia. Sejak akhir abad ke-20, pemerintah India mengupayakan koalisi dengan beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, untuk melakukan kerjasama keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia. Terutama dengan adanya kehadiran proyek *Maritime Silk Road* yang membentang dari Laut Jepang yang memanjang ke Samudera Atlantik melalui Samudera Hindia, India merasa perlu untuk memperkuat eksistensi AL India dan AL negara-negara sekutu di kawasan Samudera Hindia. Dalam upaya menentang kehadiran Tiongkok yang lebih dominan, India melakukan operasi dan latihan militer multinasional yang lebih aktif. Selain itu, India juga aktif menggerakkan blok-blok ekonomi-politik baru di kawasan Samudera Hindia yang dapat membendung pengaruh Tiongkok. Blok-blok ekonomi ini terbangun sejak awal abad ke-21 dan berada di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dengan cara-cara ini, India mengubah cara pandangnya dari sebelumnya cenderung berfokus untuk menjadi *continental power* untuk menjadi *maritime power* (Brewster 2015).

Faktor kedua yang mendorong strategi kontemporer India di Samudera Hindia adalah adanya kebangkitan ekonomi dan politik India yang kemudian mendukung reformasi di sektor pertahanan dan keamanan. Dengan bangkitnya perekonomian India, terutama setelah adanya liberalisasi ekonomi yang mulai terjadi sejak era Rao dan Vajpayee, India mulai menjadi salah satu pemain utama dalam perekonomian global. Pada masa Narendra Modi, India bahkan ditargetkan untuk menjadi sebuah negara dengan ekonomi bernilai 5 triliun Rupee. Meskipun India masih memiliki beragam masalah, namun kebangkitan ekonomi ini memberikan dampak terhadap penguatan alutsista India. Tercatat pada tahun anggaran 2020-2021, jumlah anggaran pertahanan India yang disetujui oleh Parlemen India adalah sebesar 4,71,378 krore Rupee India (66.9 milyar USD). Menurut Laxman Behera, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 9,4 persen dalam anggaran pertahanan sebagai sebuah konsekuensi dari proyeksi angka pertumbuhan GDP sebesar 6.0-6.5 persen. Menurut Behera, salah satu prioritas utama dari anggaran pertahanan India yang

meningkat adalah pembangunan proyek pangkalan baru di wilayah pesisir Barat dan Timur India serta modernisasi armada laut India (Behera 2020).

Faktor ketiga yang mengubah strategi kontemporer India secara fundamental adalah adanya aspirasi India untuk membangun Pax Indica. Pax Indica sudah menjadi pembahasan yang terus digulirkan di publik dan kalangan India sejak saat India mulai dikenali dengan aktivisme globalnya pada era Manmohan Singh. Awalnya, Pax Indica diajukan sebagai sebuah wacana yang menyatakan bahwa ada kemungkinan India akan muncul sebagai salah satu kekuatan global yang setara dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Istilah ini awalnya diperkenalkan oleh Shashi Tharoor, dimana Shashi Tharoor menyatakan bahwa takdir geografis dan warisan sejarah yang dimiliki India berkontribusi terhadap menguatnya identitas India sebagai negara besar (Tharoor 2013). Sebagai sebuah idealisme, Pax Indica sebenarnya sudah dibangun sejak pemerintahan Jawaharlal Nehru, dimana India hendak menjadi kekuatan yang mempelopori perdamaian dan stabilitas di Asia Selatan dan Asia pada umumnya. Narasi ini kemudian kembali dibincangkan akhir-akhir ini, terutama sekali dikaitkan pula dengan komitmen India terhadap Samudera Hindia. Dalam penjelasannya di hadapan forum RAISINA, Sekjen Nasional Bharatiya Janata Party, Ram Madhav menjelaskan bahwa wacana Pax Indica/kebangkitan India sebagai kuasa regional tidak berarti bahwa India akan melakukan dominasi dan konfrontasi terhadap pemangku kepentingan di Samudera Hindia. Ram Madhav melanjutkan bahwa prinsip pengelolaan Samudera Hindia adalah *multi-stakeholderism*, tidak sekadar berhenti pada *multipolarism* atau *multilateralism* (Chaudhury 2018).

S. Jaishankar, Menlu Republik India, menjelaskan pula bahwa *multi-stakeholderism* yang dijalankan oleh India sebagai prinsip pengelolaan Samudera Hindia disertai pula dengan paradigma bahwa India harus memimpin proses sebagai *net security provider* (penjamin keamanan kawasan) di wilayah sekitar Samudera Hindia. Dalam pandangan pemerintah India, India memiliki tanggungjawab untuk memastikan keamanan Samudera Hindia sebagai daerah maritim utama India (Hall 2016). Menurut Pranab Mukherjee dalam kapasitasnya sebagai Menlu India pada tahun 2007, daerah maritim tersebut mencakup wilayah yang cukup luas, yakni mencakup wilayah seluas bentangan geografis dari

Tanjung Harapan, ke Teluk Persia, yang berakhir di lautan Nusantara (Scott 2009). Adanya persepsi geopolitik yang menekankan *self-confidence* ini membuat India perlu merefleksikan kekuatan ideasional mereka dalam ranah material, sehingga peran India tidak diremehkan. Namun, seperti catatan Brewster dalam jurnalnya, mengelola wilayah seluas Samudera Hindia bukanlah tugas yang sederhana untuk dilakukan oleh India (Brewster 2015). Sehingga, dalam pengelolaan Samudera Hindia, India perlu menciptakan jejaring aliansi yang bersifat fleksibel dan merangkul sebanyak mungkin aktor yang dapat menyelaraskan kepentingannya dalam kebijakan *multi-stakeholderism*.

Lalu, yang menjadi isu adalah, bagaimana Indonesia harus memosisikan diri dalam paradigma India yang demikian? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada tiga hal yang perlu dipahami.

Poin pertama adalah soal kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang cenderung berfokus pada pendekatan bilateralisme memiliki konsekuensi yang serius terhadap kepemimpinan Indonesia di ASEAN (Willis 2017). Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Indonesia saat ini cenderung diarahkan untuk mengoptimalkan keuntungan secara cepat dari negara mitra. Hal ini dilakukan untuk dapat mempercepat tingkat pembangunan ekonomi Indonesia serta mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Adanya fokus terhadap pengembangan ekonomi yang berorientasi domestik ini membuat upaya-upaya Indonesia dalam membangun kesolidan dan menggerakkan negara-negara dalam ASEAN menjadi terpinggirkan. Sebagai *natural leader* di ASEAN, Indonesia diharapkan untuk menjadi pembangun wacana, termasuk dalam isu keamanan dan ekonomi maritim. Namun, peran tersebut tidak terlalu kuat dimainkan Indonesia dalam hal ini. Dalam kaitannya dengan India, ketiadaan peran Indonesia dalam ASEAN dapat bermakna bahwa potensi kerjasama India-ASEAN dan India-Indonesia tidak akan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam menghadapi orientasi *Pax Indica* yang hendak dibangun oleh India di Samudera Hindia, **Indonesia perlu membangun kerjasama bilateral dalam sektor yang belum dieksplorasi secara optimal.** Sejauh ini, kerjasama bilateral Indonesia dan India banyak bergerak dalam sektor

ekonomi, perdagangan dan sosial-budaya. Namun, adanya kerjasama dalam berbagai sektor ini jelas perlu dikembangkan. Dalam kaitannya dengan tata kelola Samudera Hindia, India dan Indonesia perlu melakukan kerjasama di sektor-sektor yang lebih teknikal. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah membangun kerjasama antar kota-kota pesisir di India dan Indonesia. Kerjasama antar wilayah pesisir ini tentunya hanya dapat dibangun dengan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintahan pusat dan daerah. Dalam kerangka paradiplomasi, India dan Indonesia dapat membangun kerjasama yang lebih kuat dalam sektor tata kelola samudera. Tentu saja, hal ini tidak mudah untuk diterapkan karena paradiplomasi di Indonesia dan India masih tetap berada dalam ranah yang bersifat teknikal (Surwandono & Maksun 2020, Tewari 2017). Namun, prospek kerjasama antar wilayah pesisir di kedua negara amat perlu dipertimbangkan.

Poin ketiga adalah tentang **peran Indonesia selama memegang tampuk kepemimpinan IORA pada tahun 2015-2017 dan tahun-tahun kedepan**. Selama kepemimpinan Indonesia, pemerintah Indonesia memajukan agenda poros maritim global di IORA. Dalam masa-masa tersebut, Indonesia mengajukan sebuah *roadmap* yang dinamakan sebagai *IORA Concord*. *IORA Concord* setidaknya tersusun atas 9 tujuan utama: pertama, menjamin keamanan dan keselamatan maritim; kedua, mendorong kerjasama investasi dan perdagangan di kawasan; ketiga, mendorong pengelolaan perikanan yang berkesinambungan dan bertanggungjawab; keempat, mengembangkan tata kelola bencana di kawasan; kelima, memperkuat kolaborasi akademik dan ristik dalam isu maritim; keenam, mendorong pertukaran budaya dan wisata; ketujuh, mempromosikan solusi-solusi yang menjawab permasalahan lintas-sektor; kedelapan, menguatkan kerjasama eksternal dengan organisasi terkait; kesembilan, memperkuat institusi IORA (IORA 2020).

Sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut, Indonesia dapat memperkuat dua tujuan yang juga memberikan keuntungan politik dan ekonomi bagi Indonesia. Tujuan pertama yang masih belum optimal dan belum dikuatkan adalah kolaborasi akademik antar anggota-anggota IORA. Dalam hal ini, Indonesia dapat bekerjasama dengan India untuk membangun diskusi yang lebih intensif, mengingat keduanya memiliki garis pesisir yang luas di Samudera Hindia (Mohan & Wagle 2020). Selain itu, India dan Indonesia

perlu melakukan kajian yang lebih intensif untuk menelusuri potensi sumber pangan serta pengembangan manajemen perikanan di wilayah Samudera Hindia. Menurut FAO, kualitas dan sumber daya pangan di Samudera Hindia memiliki kualitas yang tinggi (Nimarkoh, Koroma & Sablah 2017). Terlebih dengan adanya pandemi yang melemahkan pelaut dan nelayan, perlu ada satu kerangka kerja baru yang diinisiasi oleh kedua negara.

Hal kedua yang perlu diperkuat oleh Indonesia adalah mempertimbangkan kembali IOZOP untuk menjadi referensi norma untuk membangun tata kelola Samudera Hindia yang lebih baik. Bagi beberapa pihak, IOZOP mungkin terkesan usang karena IOZOP dibentuk sebagai sebuah norma pada era Perang Dingin. Namun, ada beberapa aspek dalam IOZOP seperti *non-alignment* dan *neutrality* yang masih relevan untuk dijadikan dasar dalam tata kelola Samudera Hindia. Norma IOZOP juga dapat diperbarui dengan memasukkan unsur-unsur baru seperti *inclusiveness* (inklusivitas) dan *multistakeholdership* (pengelolaan bersama) untuk mencegah upaya-upaya hegemonisasi dan memastikan perimbangan antar-aktor dalam percaturan geopolitik di Samudera Hindia (Kupriyanov 2019).

Dalam aspek lain, adanya kebijakan Indonesia untuk menjadi *global maritime fulcrum* disambut India sebagai sebuah kebijakan yang dapat bersinergi dengan India dalam visi-misinya untuk menjadi pemain utama dalam menjaga kestabilan di kawasan Samudera Hindia. Orientasi maritim yang dikehendaki oleh Presiden Joko Widodo di periode awal kepresidenannya menekankan pada penjagaan kedaulatan Indonesia di kawasan Wawasan Nusantara serta perluasan pengaruh ekonomi Indonesia di wilayah Indo-Pasifik. India kemudian menjadi bagian dari lingkaran aliansi yang dibangun oleh Indonesia dalam bangunan kerjasama Indo-Pasifik. Meskipun begitu, dalam tata kelola Samudera Hindia, India masih memberikan tempat yang lebih banyak pada poros Quadrilateral. Poros Quadrilateral ini merupakan poros yang telah berjalan sejak tahun 2007, dan digerakkan oleh adanya motif serupa, yakni ancaman Tiongkok di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Gale and Shearer 2018). Indonesia merupakan aktor yang belum lama muncul dalam dinamika tata kelola Samudera Hindia, sehingga Indonesia memang perlu membangun

reputasi dan kepercayaan dengan para negara dalam poros Quadrilateral. Sejauh ini, belum ada langkah-langkah dari Kemenlu, Kemenko Investasi dan Kemaritiman serta Presiden untuk kembali memikirkan laut dan isu kemaritiman sebagai kebijakan prioritas. Namun, kedepannya, isu-isu terkait kemaritiman perlu dipikirkan secara lebih mendalam karena laut akan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan politik internasional kedepannya.

Pada akhirnya, Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk merumuskan kebijakan yang lebih holistik dalam isu Samudera Hindia. Indonesia perlu turut serta dalam upaya-upaya yang mendukung tata kelola samudera yang didasarkan pada nilai-nilai transparansi, anti-agresi, dan demokratis. Untuk berperan secara lebih aktif dalam tata kelola Samudera Hindia di masa depan, Indonesia perlu mempertimbangkan hal berikut:

1. Memperkuat **peran Indonesia untuk memajukan agenda maritim di ASEAN**. Hal ini perlu menjadi prioritas penting yang diperjuangkan oleh Indonesia di ASEAN, karena ASEAN dapat menjadi salah satu *organizational platform* yang secara efektif mendorong terbentuknya peraturan-peraturan terkait Samudera Hindia yang lebih transparan dan demokratis. Indonesia sebagai *natural leader* di ASEAN perlu menggagas ide-idea pengelolaan Samudera Hindia untuk memastikan bahwa Samudera Hindia juga dapat memberikan keuntungan ekonomis dan politis terhadap ASEAN. Melalui ASEAN, Indonesia juga perlu mendorong kerjasama dengan organisasi regional yang dapat menguatkan *multistakeholdership* di kawasan Samudera Hindia, misal dengan BIMSTEC (*Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation*), MGC (*Mekong-Ganga Cooperation*) dan SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*).
2. Memberikan prioritas dalam membangun **kerjasama berbasis paradiplomasi antara kota-kota pesisir di wilayah India dan Indonesia**. Sejauh ini pemerintah daerah yang baru membangun kerjasama adalah wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (khususnya Pemerintah Kota Sabang) dan wilayah Negara Bagian Andaman dan Nicobar. Bentuk-bentuk kerjasama paradiplomasi ini

perlu terus dikembangkan untuk memastikan keuntungan bersama bagi India dan Indonesia, terutama dalam konteks penguatan *Comprehensive Strategic Partnership* antar kedua negara. Tentu saja, bentuk kerjasama paradiplomasi ini akan lebih banyak berfokus ke sektor ekonomi, sosial-budaya, dan pendidikan. Beberapa wilayah yang memiliki potensi dalam konteks ini adalah Medan, Padang dan Lampung. Kota-kota tersebut merupakan kota yang sejak lama memang memiliki jejak hubungan maritim dengan kota-kota di India. Kerjasama ini dapat diperluas menjadi sebuah kerangka kerjasama resmi antar kota-kota pesisir di kawasan Samudera Hindia.

3. **Membentuk suatu inisiatif baru untuk memajukan transfer teknik dan pengetahuan dalam ilmu kelautan dan kemaritiman.** Indonesia perlu aktif mendorong pihak Quadrilateral sebagai negara-negara kunci dalam tata kelola Samudera Hindia untuk membagikan *know-how* dalam pengelolaan samudera, baik dalam aspek teknis, geografis, lingkungan, politis dan legal. Adanya pusat studi bersama yang dikelola oleh IORA dan Indonesia sebagai pelopor dapat menjadi awal yang baik dalam membangun rezim tata kelola samudera yang lebih matang kedepannya.
4. **Menguatkan dan memperbarui komitmen terhadap IOZOP sebagai pilar utama dalam tata kelola Samudera Hindia.** Di tataran global dan regional, Indonesia perlu menjadi aktor normatif untuk menguatkan dan memperbarui kembali komitmen terhadap *Indian Ocean as a Zone of Peace* (IOZOP) yang implementasinya saat ini masih tidak jelas, sehingga Indonesia perlu mendorong terbentuknya dokumen baru untuk memaknai IOZOP di alaf baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Singh, Udai Bhanu. 2018. "Emerging India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership." *Journal of Defence Studies* (Institute for Defence Studies and Analyses) 79-86.
- Sanyal, Sanjeev. 2016. *The Ocean of Churn: How the Indian Ocean Shaped Human History*. New Delhi: Penguin.
- Paul, Joshy M. 2011. "Emerging Security Architecture in the Indian Ocean Region: Policy Options for India." *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India* 28-47.
- Scott, David. 2006. "India's "Grand Strategy" for the Indian Ocean: Mahanian Visions." *Asia-Pacific Review* 13 (2).
- Noviansyah, Denny. 2018. *Logam Tanah Jarang (Rare Earths Element)*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Power, Paul F. 1964. "Indian Foreign Policy: The Age of Nehru." *The Review of Politics* 26 (2): 257-286.
- Thomas, Raju G.C. 1980. "Indian Defense Policy: Continuity and Change Under the Janata Government." *Pacific Affairs* 53 (2): 223-244.
- US Congress House Committee on Foreign Affairs. 1971. *The Indian Ocean: Political and Strategic Future - Hearing 92nd Congress*. Washington DC: US Congress House Committee on Foreign Affairs.
- Vivekanandan, B. 1981. "The Indian Ocean as a Zone of Peace: Problems and Prospects." *Asian Survey* 21 (12): 1237-1249.
- Kapur, Ashok. 1987. "Indian Security and Defense Policies under Indira Gandhi ." *Journal of Asian and African Studies* 22 (3-4): 176-193.
- Scott, David. 2015. "The Indian Ocean as India's Ocean." In *The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy*, edited by David Malone, C. Raja Mohan and Srinath Raghavan. Oxford and New Delhi: Oxford University Press.

- Sebastian, Leonard, Ristian Atriandi Supriyanto, and I Made Andi Arsana. 2014. *Indonesia and the Law of the Sea: Beyond the archipelagic outlook*. Issue Brief, ANU National Security College, Canberra: Australia National University.
- Honna, Jun. 2008. "Instrumentalizing Pressures, Reinventing Mission: Indonesian Navy Battles for Turf in the Age of Reformasi." *Indonesia* (86): 63-79.
- Vallega, Adalberto. 2001. "Ocean governance in post-modern society: A geographical perspective." *Marine Policy* (25): 399-414.
- Wagner, Christian. 2013. "The Indian Ocean Rim - Association for Regional Cooperation: the futile quest for regionalism?" *Journal of the Indian Ocean Region* 9 (1): 6-16.
- Chiriyankadath, James. 2004. "Realigning India: Indian Foreign Policy after the Cold War." *The Round Table* 93 (374): 199-211.
- Acharya, Amitav. 2015. "India's 'Look East' Policy." In *The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy*. Oxford and New Delhi: Oxford University Press.
- Brewster, David. 2015. "Indian Strategic Thinking About the Indian Ocean: Striving Towards Strategic Leadership." *India Review* 14 (2): 221-237.
- Behera, Laxman Kumar. 2020. *IDSIA India*. Issue Brief, New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses .
- Tharoor, Shashi. 2013. *Pax Indica: India and the World of the Twenty-first Century* . London and New Delhi: Penguin .
- Chaudhury, D.R. 2018. *Ram Madhav suggests multi-stakeholderism model for 21st century* . January 17. Accessed April 21, 2020. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/ram-madhav-suggests-multi-stakeholderism-model-for-21st-century/articleshow/62546084.cms>.
- Hall, Ian. 2016. "Multialignment and Indian Foreign Policy under

- Narendra Modi.” *The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs* 105 (3): 271-286.
- Scott, David. 2009. “India’s “Extended Neighborhood” Concept: Power Projection for a Rising Power.” *India Review* 8 (2): 107-143.
- Gale, Jesse Barker, and Andrew Shearer. 2018. *The Quadrilateral Security Dialogue and the Maritime Silk Road Initiative*. Brief, Washington DC: CSIS.
- Willis, David. 2017. *Indonesia’s Choice: Not the Indian Ocean, But Bilateralism*. Maret 14. Accessed September 14, 2020. <https://thediplomat.com/2017/03/indonesias-choice-not-the-indian-ocean-but-bilateralism/>.
- Surwandono, and Ali Maksum. 2020. “The Architecture of Paradiplomacy Regime in Indonesia: A Content Analysis.” *Global: Jurnal Politik Internasional* 22 (1).
- Tewari, Falguni. 2017. *Paradiplomacy in India: Evulotion and operationalisation*. August 21. Accessed September 14, 2020. <https://www.orfonline.org/research/paradiplomacy-india-evolution-operationalisation/>.
- IORA. 2020. “Jakarta Concord.” *Ditjen PPI Kemendag RI*. Accessed September 14, 2020. http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180626_jakarta-concord.pdf.
- Mohan, C Raja, and Ankush Ajay Wagle. 2020. *India, Indonesia: Seizing the maritime moment*. June 24. Accessed September 14, 2020. <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/05/30/india-indonesia-seizing-the-maritime-moment.html>.
- Nimarkoh, Joan, Suffyan Koroma, and Mawuli Sablah. 2017. *Linking trade and food and nutrition security in Indian Ocean Commission member states*. Discussion Paper, Regional Office for Africa, FAO, Accra: FAO.

Kupriyanov, Aleksei Vladimirovich. 2019. “Indiiskii okean kak zona mira: ustarevshaya kontsepsiya ili format budushchego?” *Konturiy Globalnykh Transformatsiy* 12 (1): 204-219.

www.mpr.go.id